



LAPORAN KINERJA KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
2023

RINGKASAN EKSEKUTIF



Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 telah diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 yang didasari oleh:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kecamatan Pelaihari untuk masa mendatang.

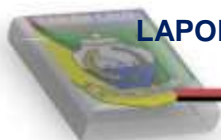
Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur peningkatan kinerja dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkelanjutan.

Pelaihari, Januari 2023

CAMAT PELAIHARI,

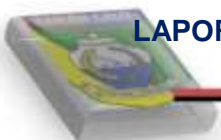


AGUS SETYO, SSTP, M.M
 Pembina/ (IV/A)
 NIP. 19850808 200412 1 001



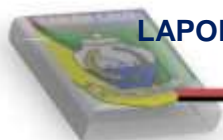
DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. ISU STRATEGIS.....	16
D. PRODUK LAYANAN.....	18
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. VISI RPJMD.....	21
B. MISI RPJMD	23
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	24
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	27
E. PERJANJIAN KINERJA.....	27
F. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	32
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	69
BAB IV PENUTUP.....	71
A. SIMPULAN	71
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	71



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.	14
Tabel 2. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	14
Tabel 3. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	15
Tabel 4. Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	15
Tabel 5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Pelaihari	17
Tabel 6. Sasaran strategis Kantor Kecamatan Pelaihari	24
Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari.....	26
Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari	27
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022.	28
Tabel 10. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022	30
Tabel 11. Pengelompokan Capaian Kinerja	33
Tabel 12. Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022	33
Tabel 13. Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2022	34
Tabel 14. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Pelaihari	36
Tabel 15. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2022.....	37
Tabel 16. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2018-2022.....	38

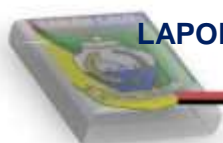


Tabel 17	Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022.....	40
Tabel 18	Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Sekretariat Kecamatan Pelaihari.....	41
Tabel 19	Realisasi, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Kecamatan Pelaihari	42
Tabel 20	Realisasi Nilai RB Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 berdasarkan Komponen penilaian	42
Tabel 21	Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 berdasarkan Komponen penilaian	43
Tabel 22	Realisasi Capaian SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 dan Persentase Capaian Kinerja Terhadap Target SAKIP Tahun 2022	43
Tabel 23	Sumber Daya Manusia pada Bagian Sekretariat.....	44
Tabel 24	Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022.....	44
Tabel 25	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA. 2022.....	45
Tabel 26	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2022.....	48
Tabel 27	Sumber Daya Anggaran pada Seksi PMD/K Tahun 2022	51
Tabel 28	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan TA. 2022	53
Tabel 29	Sumber Daya Anggaran pada Seksi Kemasyarakatan Tahun 2022	55
Tabel 30	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban TA. 2022	55
Tabel 31	Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan TA. 2022	58
Tabel 32	Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022	59

Tabel 33	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian TA. 2022	61
Tabel 34	Realisasi Anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	63
Tabel 35	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Perencanaan dan Keuangan TA. 2022	64
Tabel 36	Realisasi Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	65
Tabel 37	Realisasi Target Indikator Kinerja Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2021-2022	66
Tabel 38	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022	69
Tabel 39	Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kantor Kecamatan Pelaihari.....	69
Tabel 40	Realisasi Persentase Keuangan, Fisik dan Efisiensi Sasaran Strategis Kecamatan Pelaihari Tahun 2022	70
Tabel 41	Perbandingan Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2021-2022.....	70
Tabel 42	Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2021-2022	70

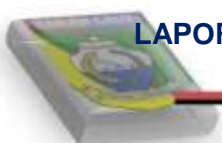
DAFTAR GAMBAR

		Halaman
		an
Gambar 1.	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari	3
Gambar 2.	Pelaksanaan Tes Wawancara dan Praktik Pemilihan Calon Staf Administrasi BPD dan Calon Perangkat Desa Panggung Baru	46
Gambar 3.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pelaihari	49
Gambar 4.	Pelaksanaan Musrenbang Desa di Kecamatan Pelaihari	49
Gambar 5.	Pelaksanaan Evaluasi APBDes di Kecamatan Pelaihari.....	50
Gambar 6.	Kafilah MTQ Kecamatan Pelaihari pada MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 di Kecamatan Bati- bati	53
Gambar 7.	Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan Masyarakat Desa Pemuda pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2022	54
Gambar 8.	Operasi Gabungan Penerapan Protokol Kesehatan dan Penertiban Jam Malam di Kelurahan Sarang Halang	56
Gambar 9.	Kegiatan Monitoring IMB Pagar dan Bangunan	56
Gambar 10	Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik terkait Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan Pelaihari.....	60



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Realisasi dan Target IKM Tahun 2018-2022.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

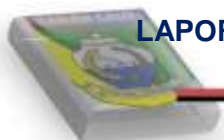
A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 merupakan wujud dari pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 didasari atas :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

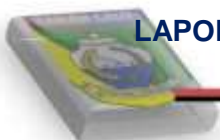
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Kecamatan Pelaihari dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

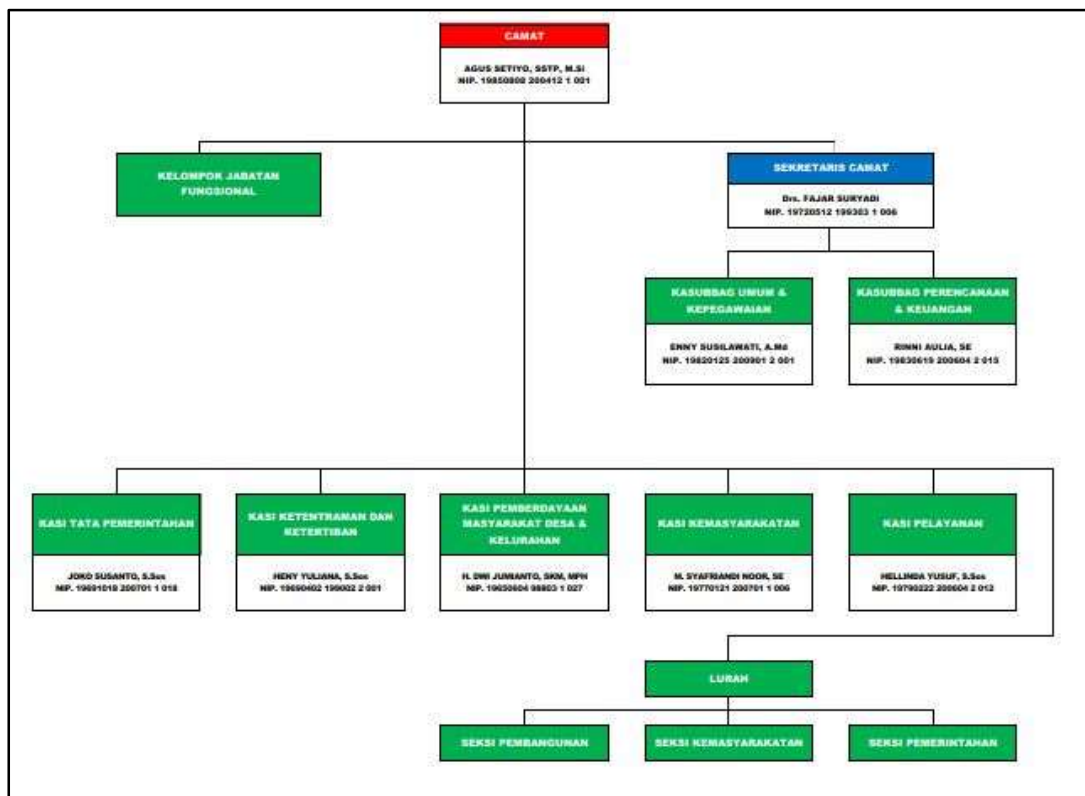
Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Pelaihari disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- 6) Seksi Kemasyarakatan
- 7) Seksi Pelayanan
- 8) Kelompok jabatan fungsional
- 9) Kelurahan



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari dapat dilihat dilihat pada Gambar.1 dibawah ini :



Gambar. 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari

Sekretariat kecamatan adalah unsur staf dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi-seksi pada kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelompok Jabatan Fungsional ditunjuk oleh Bupati atau pejabat lainnya sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah-wilayah kerja dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuaidengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;

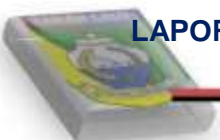
- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Pelaihari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Pelaihari dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;



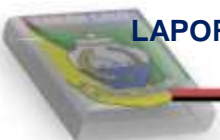
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Pelaihari dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Adapun uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

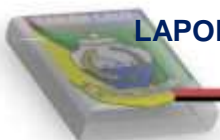


- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;

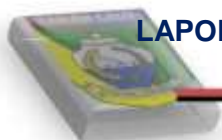


- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;

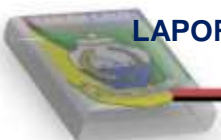


- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparatdesa;
- m. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- n. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- o. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

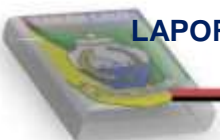
- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;



- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- j. mengolah dan memproses surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, surat jalan dan surat keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- k. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK 5;
- l. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- m. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - 1) Penanggulangan bencana.
 - 2) Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
 - 3) Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
 - 4) Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat
 - 5) Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
- o. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
- q. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

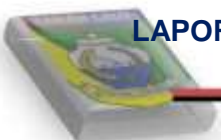


- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- c. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan
- i. retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- k. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan social terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- l. mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;



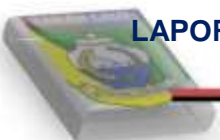
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

6. SEKSI PELAYANAN

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. Melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, Kecamatan Pelaihari didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana penunjang operasional kantor. Jumlah Pegawai Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari sebanyak 26 (dua puluh enam) orang terdiri dari 18



(delapan belas) orang PNS dan 8 (delapan) orang PTT (non PNS). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Jabatan, Eselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	Camat	III.a	1		1
2.	Sekretaris	III.b	1		1
3.	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		3	4	7
	b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		2	1	3
4.	Kasi Tata Pemerintahan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		0		0
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1
7.	Kasi Kemasyarakatan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1
8.	Kasi Pelayanan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	3	4
JUMLAH			18	8	26

Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan lingkup kantor Kecamatan Pelaihari untuk golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang, Golongan III sebanyak 13 (tiga belas) orang, golongan II sebanyak 2 (dua) orang dan golongan I sebanyak 0 (nol) orang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

NO	Jenis Pangkat	Golongan/Ruang	JUMLAH
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	0
5.	Pembina	IV/a	3
		JUMLAH	3
6.	Penata Tk.I	III/d	5
7.	Penata	III/c	1
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	5
9.	Penata Muda	III/a	2
		JUMLAH	13
10.	Pengatur Tk.I	II/d	0
11.	Pengatur	II/c	2
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
13.	Pengatur Muda	II/a	-
		JUMLAH	2
13.	Juru Tk.I	I/d	-
14.	Juru	I/c	-
15.	Juru Muda Tk.I	I/b	-
16.	Juru Muda	I/a	-

	JUMLAH	-
	JUMLAH TOTAL	18

Jenjang pendidikan pegawai kantor Kecamatan Pelaihari untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 0 (nol) orang, Jenjang SLTA/SMK sebanyak 3 (tiga) orang, Jenjang D3 sebanyak 4 (empat) orang, jenjang S1 sebanyak 9 (sembilan) orang dan master/pasca sarjana (S2) sebanyak 2 (dua) orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		
		PNS	Non PNS / PTT	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA/SMK	3	3	6
4.	D.1	-	-	-
5.	D.2	-	-	-
6.	D.3	4	2	6
7.	D.4	-	-	-
8.	Sarjana (S-1)	9	3	12
9.	Pasca sarjana/Master (S-2)	2	-	2
-	Doktor (S-3)	-	-	-
JUMLAH		18	8	26

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Pelaihari didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Pompa air	1	1		
2.	Mini bus	2	2		
3.	Sepeda motor	4	4		
4..	Lemari besi	10	7	3	
5.	Lemari kayu	3		3	
6.	Rak besi	3	3		
7.	Rak kayu	2			
8.	Filing cabinet besi	8	8		
9.	Lemari makan	1			1
10.	CCTV	2	2		
11.	Papan visual / papan nama	1	1		
12.	Papan pengumuman	1	1		
13.	Meja kerja kayu	30	18	12	
14.	Meja rapat	20	20		
15.	Kursi tamu	3	3		
16.	Kursi biasa	19	14	2	3
17.	Bangku tunggu	4	2	2	
18.	Sofa	5	4		
19.	Mesin pemotong rumput	1		1	

20.	Lemari es	2	2		
21.	AC split	12	9	3	
22.	Kipas angin	7	7		
23.	Televisi	1	1		
24.	Loudspeaker	2	1		
25.	Sound system	2	1		
26.	Stabilisator	1	1		
27.	Camera video	1	1		
28.	Handy cam	1	1		
29.	Karpet	4	4		
30.	Tangga	1	1		
31.	Audio mixing stationer	1	1		
32.	Audio monitor active	1	1		
33.	Audio visual	1	1		
34.	Microphone/wireless MIC	1	1		
35.	Power amplifier	3	1		
36.	Layar film/proyektor	3	2	1	
37.	Alat studio pemetaan lainnya	2	2		
38.	Genset	1	1		
39.	Uninterrupted power supply (UPS)	1	1		
40.	PC unit	8	6	2	
41.	Lap top	9	7	2	
42.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	13		3
43.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1		
44.	Kursi Rapat	67	67		

C. ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

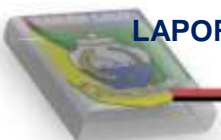
- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- d) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.



Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

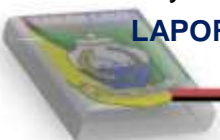
- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan yang tepat waktu;
- c) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- d) Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes;
- e) Kurang tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. : Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Pelaihari

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketentraman, Ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum memadai
2.	Pemberdayaan dan penguatan Kelompok rentan	Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk Musrenbang Kabupaten	Kurang aktifnya Lembaga Kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna Posyandu) di desa Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan
3.	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan tepat waktu Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes; Kurang tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jumlah personil di Kecamatan Pelaihari masih kurang Kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Pelaihari masih kurang memadai peralatan penunjang gedung kantor Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan Belum optimalnya laporan keuangan desa yang cepat waktu dan sesuai standar pelaporan Belum terisinya semua jabatan fungsional umum sesuai standar SOTK Kecamatan yang seharusnya jumlah ASN 35 orang, tersedia hanya 18 orang Kuranganya peluang dan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN Kuranganya Anggaran dan sarana prasarana penunjang operasional kegiatan

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut. :



1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. PRODUK DAN LAYANAN

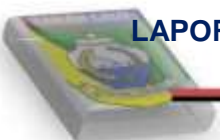
Kecamatan Pelaihari menerbitkan beberapa produk layanan yang didasari oleh:

1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021;
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 180 Tahun 2015;
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian dan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun jenis layanan tersebut terdiri dari:

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
15. Legalisasi Permohonan Perizinan



B. Pelayanan Perizinan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial (ada perubahan regulasi, IMB tidak dapat dipungut karena ada SE Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ Tahun 2021 Tentang PERCEPATAN PENYUSUNAN REGULASI PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA, PENYELENGGARAAN LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI PERSUTUJUAN BANGUNAN GEDUNG SERTA RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)
2. Izin Usaha Mikro dan Kecil
3. Izin Bilyard Non Komersial
4. Izin Playstation/Video Game

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

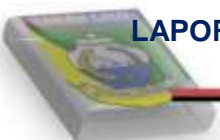
Dalam pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2022 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi |
| | <ul style="list-style-type: none"> A. Latar Belakang B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi C. Isu Strategis D. Produk dan Layanan E. Sistematika Penyajian |
| BAB II | Perencanaan dan penetapan kinerja, menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan |
| | <ul style="list-style-type: none"> A. Visi RPJMD B. Misi RPJMD C. Tujuan dan Sasaran Strategis D. Indikator Kinerja Utama E. Perjanjian Kinerja F. Program dan Kegiatan |
| BAB III | Akuntabilitas Kinerja |
| | <ul style="list-style-type: none"> A. Capaian Kinerja Organisasi <p style="padding-left: 40px;">Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja</p> |



organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon III.a (Kepala Kantor/Camat)
 - a) Eselon IV.a (Kepala Seksi)
3. Eselon III.b (Sekretaris Camat)
 - a) Eselon IV.b (Kepala Sub Bagian)

B. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja

1. Anggaran dan realisasi APBD 2022
2. Anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program
3. Perbandingan program dan kegiatan Tahun 2021 dan 2022

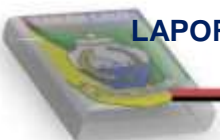
BAB IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. IKU
2. Cascading/Pohon Kinerja
3. PK 2022
4. Laporan Relisasi Fisik dan Anggaran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Rencana Strategis Kabupaten Tanah Laut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

“TERWUJUDNYA TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)”

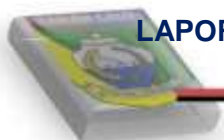
Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

INOVASI

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,



baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA

Aspek administrasi dan aspek substansi di atur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

RELIGIUS

Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas sebagai sarana membangun produktivitas aparatur daerah dan kehidupan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkatdaerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani yaitu masyarakat di daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah "**DESA DIBINA, KOTA DITATA**". Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah "**KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS**".

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus "*DESA DIBINA, KOTA DITATA*" melalui "*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*". Fokus pada lokus "*DESA DIBINA, KOTA DITATA*" adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayahperdesaan dan perkotaan.

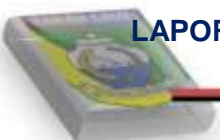
Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

B. MISI RPJMD

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan "**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**", maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA	: Diwujudkan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut
INOVASI	: Diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
TERTATA	: Diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
RELIGIUS	: Diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
AKTUAL DAN SINERGI	: Diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Rencana Strategis Kecamatan Pelaihari yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung, Misi ke-1, Misi ke-3, dan Misi ke-4 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 yaitu bertepatan dengan tahun ke empat Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2022 pada pembahasan selanjutnya.



Misi I : meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan indikator Nilai SAKIP, Nilai RB.

Misi4: Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Pelaihari beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023. Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
2. Terwujudnya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pelaihari adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian.
4. Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kantor Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Sasaran strategis Kantor Kecamatan Pelaihari

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	80%
2.	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60
		Nilai SAKIP	82
		Nilai ZI	51
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%
4.	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%

Pernyataan tujuan Kecamatan Pelaihari diatas mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Pelaihari handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Pelaihari menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Pelaihari, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan. Visi Kepala Daerah sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam misi Kepala Daerah yang ditetapkan untuk Kecamatan Pelaihari harus menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai gambaran aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk menggambarkan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator-indikator beserta target-targetnya pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai Renstra Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	70%	72%	75%	80%	80%	
2	Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indek RB	60	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	45 (C)	46 (CC)	50 (CC)	60 (CC)	60 (CC)	
					Nilai SAKIP	72 (BB)	75 (BB)	80 (A)	82 (A)	83 (A)	
					Nilai Zona Integritas	49	49	50	51	52	
3	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Presentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib	100%	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	
				Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Pelaihari menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan.

Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Pelaihari dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini :

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari

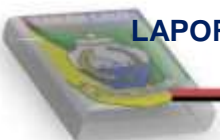
No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	Hasil survey (80)	Semua kasi di kecamatan

Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi Kecamatan Pelaihari Nomor 1 Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meliputi pengukuran terhadap tingkat kepuasan terhadap pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat dengan penanggung jawab Seksi Pelayanan, Seksi PMD/K, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Kemasyarakatan. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran untuk Nomor 2 Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif, efisien yaitu persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib dengan penanggung jawab yaitu Subbag Umum dan Kepegawaian serta Subbag Perencanaan dan Keuangan.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa



yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai.

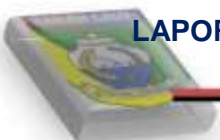
Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/proyeksi ke depan.

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 yang telah disepakati baik oleh Camat, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Camat :				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	80%	4 program/ 7 kegiatan / 12 sub Kegiatan	Rp. 11.290.527.596,-
Sekcam :				
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB Nilai SAKIP Nilai Zona Integritas	60 82 51	1 Program / 4 Kegiatan / 9 sub kegiatan	Rp. 10.564.235.854,-
Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP	100%		
Meningkatnya tata kelola perencanaan keuangan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%		
Kasubbag Umpeg :				
Memberikan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	17 orang	1 program / 3 kegiatan / 8 sub kegiatan	Rp. 434.303.597,-
Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	223 Unit		
Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	15 dokumen		
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :				
Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 dokumen	1 program / 1 kegiatan / 1 sub kegiatan	Rp. 10.129.932.257,-
Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 dokumen		
Kasi Tata Pemerintahan :				
Memfasilitasi pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 Desa	0 program / 0 kegiatan	Rp. 0,-
Memfasilitasi	Jumlah desa yang	15 Desa		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD			
Monitoring Penyusunan Laporan kependudukan	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	15 Desa		
Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	2 kali		
Kasi PMD/K :				
Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam memasarkan hasil produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang bisa memasarkan hasil produksinya	5 kelompok	2 Program / 2 Kegiatan / 2 Sub Kegiatan	Rp. 22.888.921,-
Memberikan pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	15 Desa		
Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	15 Desa		
Memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersial	Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersial sesuai SOP	50 Dokumen		
Fasilitasi kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	2 Kali		
Kasi Kemasyarakatan :				
Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang Kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	15 kelompok	1 program / 1 kegiatan / 1 sub kegiatan	Rp. 703.402.821,-
Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan olahraga di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP	15 kegiatan		
Memfasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang telah di fasilitasi penyaluran bantuan sosial	1000 orang		
Kasi Trantib :				
Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi	2 kejadian	0 program / 0 kegiatan / 0 sub kegiatan	Rp. 0,-
Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	10 kelompok		
Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	2 kejadian		
Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan	1 kegiatan		



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
ketertiban masyarakat di Kecamatan	ketertiban masyarakat yang dimonitoring			
Kasi Pelayanan :				
Memberikan pelayanan administasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 pelayanan	0 program / 0 kegiatan / 1 sub kegiatan	Rp. 0,-
Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	5 pengaduan		
Menyusun Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah data informasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	4 dokumen		

Kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran 2022 yang telah tergambar dalam DPA-SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022 itulah yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun 2022.

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pelaihari pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2022, melaksanakan 4 Program, 7 Kegiatan, dan 12 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
1.	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 10.129.932.257,-
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				
3.	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.545.473,-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 35.122.473,-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 10.176.984,-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 70.000.000,-
				Kegiatan	Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	
				Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 197.917.387,-
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Rp. 60.000.000,-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 11.784.200,-
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 12.975.377,-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp. 703.402.821,-
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 9.913.544,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut.

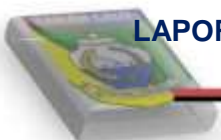
Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja keempat RPJMD 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999).

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan



Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

Tabel 11. Pengelompokan Capaian Kinerja

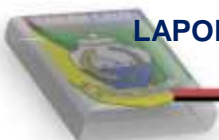
Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II.	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III.	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat baik
IV.	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V.	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI.	Diatas 30 % sampai dengan 50 %	Kurang
VII.	Kurang dari 30%	Sangat Kurang

adapun capaian kinerja Sasaran strategis Kantor Pelaihari 2022 terhadap target sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022			
			Target	Realisasi	Capaian	
					%	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	80	87,01	108,76	Sangat Memuaskan

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017



tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
9. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2022 adalah dari target 80%, dengan nilai capaian sebesar 108,76% , berdasarkan Tabel 11. tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 termasuk kategori **Sangat Memuaskan**.

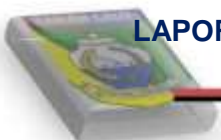
Nilai capaian IKU tahun 2022 bila dibandingkan dengan capaian IKU Tahun 2021 memang mengalami peningkatan sebesar 5,09 %, dan dari sudut realisasi IKM juga meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 realisasi IKM sebesar 3,277 (Mutu Pelayanan B) dari target 75, sementara pada Tahun 2022 realisasi IKM sebesar 3,480 (Mutu Pelayanan B) dari target 80, ada peningkatan realisasi IKM sebesar 2,013.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 13. Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2022

No	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan	3,37	9,35
2.	Prosedur	3,36	9,32
3.	Waktu Pelayanan	3,32	9,22
4.	Biaya / Tarif	3,99	11,0,7
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,34	9,27
6.	Kompentensi Pelayanan	3,32	9,22
7.	Perilaku Pelayanan	3,34	9,27
8.	Maklumat Pelayanan	3,34	9,27
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,98	11,05

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/tarif (3,99) sedangkan unsur yang



Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur waktu pelayanan dan Kompetensi Pelayanan (3,32). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif sesuai ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 3,84 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Pelaihari pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur persyaratan.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Pelaihari menetapkan target nilai IKM sebesar 80% sementara berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2022 diperoleh realisasi nilai IKM 87,01 (Mutu Pelayanan Baik) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terdapat nilai IKM sebesar 7,01 dari target yang ditetapkan.

Kendala permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pelaihari dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah sebagai berikut :

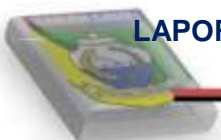
1. Unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat.
2. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan prima bagi masyarakat.

Adapun upaya/solusi tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan sistem dan prosedur (SOP) dalam hal pengaduan, saran dan masukan dengan membuat banner/spanduk yang berisi tata cara alur dan mekanisme pengurusan perizinan/surat keterangan di Kecamatan Pelaihari.
2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait (Diskominfo) untuk pembuatan sistem aplikasi pelayanan dan perizinan di Kecamatan Pelaihari.
3. Membuka kanal pengaduan, saran, dan masukan melalui media sosial yang sedang populer dikalangan masyarakat usia produktif.

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan kotak pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat untuk bahan evaluasi dan monitoring bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan membangun sistem aplikasi pelayanan dan perizinan di Kecamatan Pelaihari.
3. Mengaktifkan lagi akun Sosial Media Kecamatan Pelaihari dalam rangka keterbukaan informasi kepada masyarakat maupun sebagai laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pelaihari sehingga kinerja Kecamatan Pelaihari dapat diketahui oleh masyarakat.



Selain itu diharapkan kerjasama dengan para stake holder terkait untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar pelayanan di Kecamatan Pelaihari sesuai dengan harapan masyarakat.

1. Sasaran RPJMD

Pada Tahun 2022 (Tahun Ke-4) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, Kecamatan Pelaihari menetapkan 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan Tujuan kedua Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik serta Tujuan Ketiga Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien. Sasaran strategis Kecamatan Pelaihari yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian serta Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan.

Aktualisasi sebagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan, dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut :

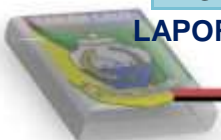
1. Kebijakan meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan.
2. Kebijakan mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional dan daya saing.

Kebijakan mengembangkan perekonomian desa yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi di pedesaan.

Adapun tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan sesuai dengan Visi “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi, (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)” dan Misi “Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan masyarakat berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya” dituangkan dalam tabel 14 berikut :

Tabel 14. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Pelaihari

VISI	: Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi, Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi
MISI	: Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan masyarakat berbasis



teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Terkait. 2. Memperkuat pemahaman aparat akan tugas pokok dan fungsi. 3. Memberdayakan aparat Kecamatan Desa/ Kelurahan. 4. Menyederhanakan dan mempercepat sistem pelayanan kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi yang intensif 2. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat-diklat. 3. Memberikan pemahaman kepada aparat Desa mengenai tupoksinya baik melalui arahan ataupun diklat formal / non formal. 4. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang baik.
Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan pemahaman ASN terhadap Sistem Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi	Menerapkan budaya kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	1. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Meningkatkan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran.	Melaksanakan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran.
	2. Meningkatkan tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Meningkatkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pelaporan keuangan	Memberikan arahan untuk selalu dapat melakukan pengumpulan laporan tepat waktu, akurat dan tertib

2. Eselon III (Camat)

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 mencapai 87,01 % dari target sebesar 80 % dengan persentase capaian 108,76%. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel 15 berikut.

Tabel 15. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada dikecamatan	80%	87.01 %	108,76

Adapun realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan Pelaihari dari tahun 2018-2022 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16 berikut:

Tabel 16. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	70	81,81	116,87	72	81,90	113,75	75	81,92	109,2%	80	87,01	108,76

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target:

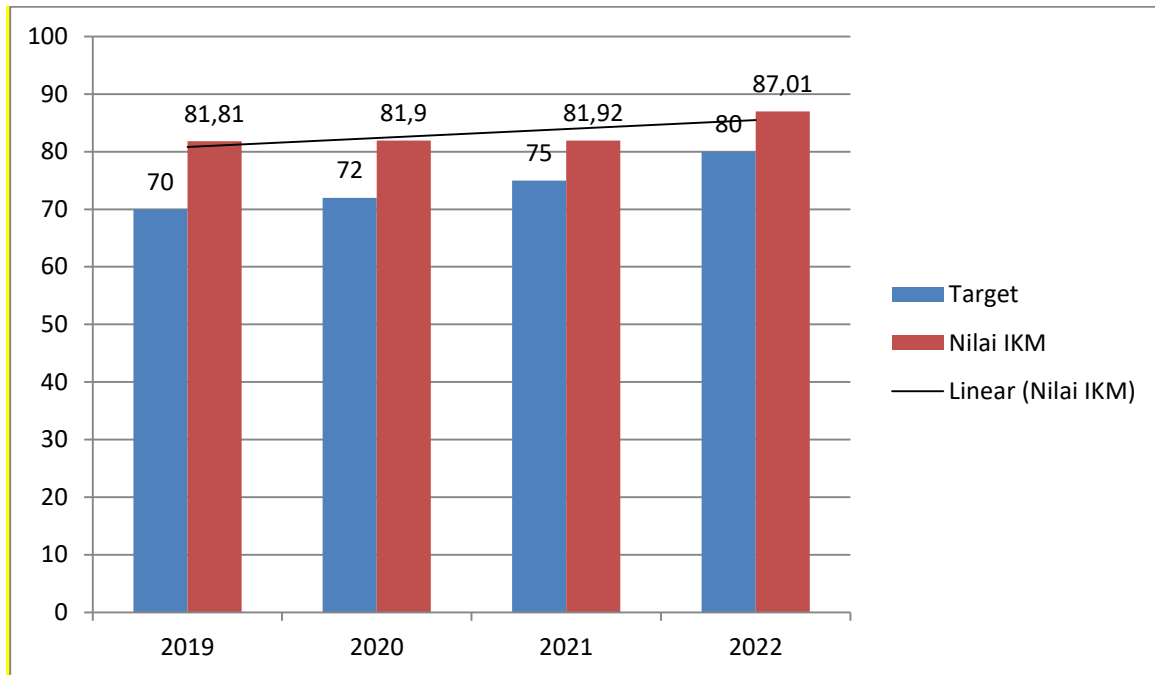
Pencapaian realisasi dari target Tahun 2022 sebesar 87.01% dan dibandingkan dengan target realisasi 2022 maka pencapaian target 2022 mencapai 108,76%. Selain terjadi peningkatan realisasi nilai IKM dari 2021 ke 2022, persentase capaian juga meningkat. Peningkatan ini tercapai karena adanya hubungan dan koordinasi yang cukup baik antara dinas/instansi terkait dengan Kecamatan Pelaihari. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang cukup besar mempengaruhi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

- a) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu 81,92 % menjadi 87,01 %.
- b) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 sebesar 108,76% dibandingkan tahun 2021 sebesar 109,2 % terjadi penurunan 0,44%.
- c) Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pelaihari tahun 2022 sebesar 80, maka realisasi 2022 sudah mencapai 108,76% dari target;

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Sasaran Srategis Kecamatan Pelaihari dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 terdapat peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan Renstra Kecamatan Pelaihari 2018-2023 dalam wujud Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan terget nilai 80.

Untuk lebih jelasnya realisasi dan target IKM Tahun 2019-2022 Kantor Kecamatan Pelaihari dapat di lihat dari grafik tersebut dibawah ini :



Grafik 1. Realisasi dan Target IKM Tahun 2019-2022

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pelayanan terhadap masyarakat/publik terkait pelayanan umum tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 terjadi kenaikan penilaian. Kenaikan penilaian terutama pada unsur produk spesifikasi jenis pelayanan dan sarana prasarana pelayanan. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengurusan pelayanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pelaihari sesuai dengan kewenangan telah terlayani sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Terjadinya peningkatan nilai IKM tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 di tunjang dari kesiapan pelayanan publik di kantor Kecamatan Pelaihari. Baik dari kesiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana penunjang dan jaringan internet setiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun demikian sangat diharapkan kinerja pelayanan harus mengalami peningkatan setiap tahunnya demi mencapai pelayanan prima.

Ketentuan biaya tarif layanan dihapuskan / gratis pada beberapa pelayanan seperti pengolahan KTP, KK, Akte kelahiran, Kartu Identitas Anak dan lain-lain menyebabkan salah satu unsur yang paling tinggi tingkat kepuasan masyarakat di tahun 2022.

Nilai terendah ada pada unsur penanganan pengaduan saran dan masukan jenis layanan dari tahun 2021-2022 dikarenakan tidak ada pengaduan permasalahan pelayanan dari masyarakat yang mengurus layanan perizinan dan

layanan non perizinan karena dianggap bahwa aparatur Kecamatan Pelaihari telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan sehingga masyarakat yang melakukan pengurusan izin merasa dipermudah dan waktu yang cepat sampai izin selesai dikerjakan oleh aparatur Kecamatan Pelaihari.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan, Kantor Kecamatan Pelaihari di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 11.290.527.596.- dan realisasi sebesar Rp. 9.807.226.944.- atau 86,86 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 17 berikut :

Tabel 17. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.564.235.854,-	Rp. 9.219.245.145,-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 12.975.377,-	Rp. 12.043.866,-
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 703.402.821,-	Rp. 575.937.933,-
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 9.913.544,-	Rp. 0,-
JUMLAH		Rp. 11.290.527.596,-	Rp. 9.807.226.944,-

Dalam rangka mendukung indikator sasaran Eselon III (Camat) sekaligus Perjanjian Kinerja Camat Pelaihari yang juga merupakan IKU Kecamatan Pelaihari yang dilaksanakan oleh seluruh Kasubbag dan Kasi lingkup Kecamatan Pelaihari dapat dijelaskan dibawah ini.

Pada Tahun 2018 Kecamatan Pelaihari telah dilaksanakan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dengan nilai B yang berarti secara umum implementasi SAKIP Baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, tetapi perlu sedikit perbaikan.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Pelaihari telah dilaksanakan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dengan nilai BB yang berarti sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memilki sistem manajemen kinerja yang andal.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Pelaihari masih dalam proses hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim dari Menpan RB dan reuiu oleh APIP Inspektorat Kab. Tanah Laut.

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :



Nilai Sakip dengan target 75 dengan realisasi 62,56 (B) dengan presentase 83,41 % untuk mencapai target menggunakan anggaran Rp. 1.699.400,- kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan kendala yang dihadapi yaitu kurang berperannya para Kasi dalam mendokumentasikan setiap kegiatan.

- Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :
 - a. Para kasi dan kasubbag lingkup Kecamatan Pelaihari diarahkan untuk melaksanakan kegiatan dengan membuat laporan kegiatan, melengkapi foto dan video kegiatan serta menyimpan dalam 1 (satu) folder tersendiri di PC atau laptop.
 - b. Mengintensifkan kegiatan rapat staf dalam rangka pemberian arahan kegiatan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
- Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai sakip yaitu :
 - a. Mengefektifkan penggunaan media sosial resmi kecamatan dalam rangka transparansi publik, menambah platform media sosial berupa instagram, mengupdate kembali konten berita kegiatan pada website kecamatan.

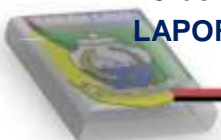
3. Eselon III (Sekretaris)

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 untuk persentase pengelolaan umum dan kepegawaian yang tertib dapat terealisasi penuh 100%. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel 18 berikut.

Tabel 18. Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Sekretariat Kecamatan Pelaihari

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60	62,67	104,45%
		Nilai SAKIP	82	76,3	93,04%
		Nilai Zona Integritas (ZI)	51	63,92	125,33%
2.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100 %	100%
3.	Meningkatnya tata kelola perencanaan keuangan SKPD	Presentase pengelolaan perencanaan pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu	100 %	100 %	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					104,564%

Adapun realisasi capaian target terhadap peningkatan implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja (Nilai RB, Nilai SAKIP dan Nilai ZI) dan peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian (Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib) yang ada di Kecamatan Pelaihari dari tahun 2020-2021 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 19 berikut:



Tabel 19. Realisasi, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Kecamatan Pelaihari

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai RB	-	17,21	19,8	60	62,67	104,45%
2.	Nilai SAKIP	-	56,54	62,56	82	76,3	93,04%
3.	Nilai ZI	-	35,35	35,35	51	63,92	125,33%
4.	Persentase pengelolaan administasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
5.	Presentase pengelolaan perencanaan pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi nilai RB tahun 2021 sebesar 19,8 (D) sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 62,67 (B) dari target 60 dengan capaian sebesar 104,45%. Secara nilai capaian ada kenaikan nilai dari tahun sebelumnya. Nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 62,56 (B) dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan nilai 76,3 (BB) dengan capaian realisasi dari nilai target 82 mencapai 93,04%. Nilai ZI 2021 yaitu 35,35 (C) dan pada tahun 2022 nilai ZI adalah 63,92 dengan realisasi capaian 125,33%. Berikut komponen penilaian RB Kecamatan Pelaihari dapat dilihat pada tabel 20 berikut.

Tabel 20. Realisasi Nilai RB Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 berdasarkan Komponen penilaian

No	Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai						
		2019	2020		2021		2022	
			Pemenuhan	Reform	Pemenuhan	Reform	Pemenuhan	Reform
1	Manajemen Perubahan	-	0,94	1,50	1,51	0,84	0,75	1,22
2	Deregulasi Kebijakan	-	0,50	0	1	1	0,75	2
3	Penataan Organisasi	-	1,37	0,75	1,15	1,5	0,43	1,5
4	Penataan Tata Laksana	-	0,62	0	0,43	0,79	0,43	2,12
5	Penataan Manajemen SDM	-	1,11	0,50	0,89	1,5	0,88	1,5
6	Penguatan Akuntabilitas	-	2,09	2,31	1,39	2,22	1,39	2,97
7	Penguatan Pengawasan	-	1,04	1,95	0,84	1,31	1,09	1,31
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	1,69	0,84	1,77	1,66	1,45	2,96
Jumlah		-	9,36	7,85	8,98	10,82	7,17	15,58
Total Jumlah Pengungkit			17,21		19,80		22,75	

Kemudian nilai SAKIP tahun 2022 dengan nilai 76,3 dari target nilai 82 atau dengan capaian 93,04 dengan nilai komponen perencanaan kinerja 24,00 point, pengukuran kinerja 23,01 point, pelaporan kinerja 10,995 point dan evaluasi internal 18,325. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 21 berikut.

Tabel 21. Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 berdasarkan Komponen penilaian

No	Komponen Penilaian	Nilai				Keterangan
		2019	2020	2021	2022	
1.	Perencanaan Kinerja	24,41	20,87	20,87	24,00	
2.	Pengukuran kinerja	16,25	12,82	13,75	23,01	
3.	Pelaporan kinerja	11,41	9,97	9,97	10,995	
4.	Evaluasi internal	6,92	0	5,11	18,325	
5.	Pencapaian kinerja	17,08	0	12,88		
Jumlah		76,08	56,54	62,56	76,3	

Sumber data : Rekap hasil evaluasi SAKIP Kab. Tanah Laut Tahun 2019 - 2022

Nilai Sakip Kecamatan Pelaihari pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 pada semua komponen penilaian. Pada tahun 2022 hanya ada 4 (empat) komponen penilaian. Komponen penilaian yang mendapat nilai tertinggi adalah Perencanaan Kinerja dengan nilai 24 point.

Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib di lingkungan Kecamatan Pelaihari dan Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu dapat terpenuhi seluruh target (100%) baik dalam hal keperluan kepegawaian dan administrasi umum maupun dalam hal perencanaan dan pelaporan keuangan.

2) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait;

- 1) Realisasi Target nilai SAKIP tahun 2021 dengan tahun 2022 untuk Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sama 100%; Realisasi Indikator Nilai RB Tahun 2021 sebesar 19,8 dan Nilai RB Tahun 2022 sebesar 62,67. Nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 62,56 sedangkan tahun 2022 sebesar 76,3.
- 2) Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis tahun 2022 optimis dapat tercapai dengan melihat hasil realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 22. Realisasi Capaian SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 Dan Persentase Capaian Kinerja Terhadap Target SAKIP Tahun 2022

No.	Jenis Data	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Target 2023	Kinerja Tahun 2022 (%)		
				Target	Realisasi		Terhadap Capaian Tahun 2021	Terhadap Target Tahun 2022	Terhadap Target Tahun 2023
1.	RB	Nilai	19,80	60	62,67	60	316,5	104,45	104,45
	SAKIP	Nilai	62,56	82	76,3	82	121,96	93,04	93,04
	ZI	Nilai	35,35	51	63,92	51	180,82	125,33	125,33
2.	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100

No.	Jenis Data	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Target 2023	Kinerja Tahun 2022 (%)		
				Target	Realisasi		Terhadap Capaian Tahun 2021	Terhadap Target Tahun 2022	Terhadap Target Tahun 2023
	yang tertib dan tepat waktu								

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja di sekretariat setiap tahunnya meningkat dapat dilihat dari realisasi program kegiatan penunjang dan nilai SAKIP kecamatan Pelaihari. Hal ini ditunjang Sumberdaya Manusia yang ada dan sarana penunjang yang cukup lengkap dan terfasilitasi dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja meningkat.

4) Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan pada bagian sekretariat, Kecamatan Pelaihari dibantu oleh 11 orang ASN dan PTT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Sumber Daya Manusia pada Bagian Sekretariat

NO	JABATAN	ASN	PTT
1	Sekretaris	1	
2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	
4	Bendahara	1	
5	Verifikator	1	
6	Analisis Tata Laksana	1	
7	Pengadministrasi Umum	1	
8	Pengelola Sarana dan Prasarana	1	
9	Petugas Operator Keuangan		1
10	Petugas Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian		2
Jumlah		8	3

5) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, Kantor Kecamatan Pelaihari didukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 10.564.235.854.- dan realisasi sebesar Rp. 9.219.245.145 atau 87,26%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 24 berikut ;

Tabel 24. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp)	Persentase Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.564.235.854,-	Rp. 9.219.245.145,-	87,26%

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya tenaga ASN yang menangani kearsipan dokumen dengan kualifikasi golongan II jabatan fungsional arsiparis.

- b. Kurangnya kendaraan dinas operasional yang menunjang kegiatan dalam pembinaan, pemberdayaan kelurahan dan desa untuk sosialisasi dan edukasi sesuai tupoksi seksi masing-masing.
 - c. Kurangnya mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf untuk penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semester, Tahunan), serta Laporan Kinerja SKPD.
- Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :
- a. Melakukan usulan kebutuhan ASN yang menangani masalah kearsipan lingkup kecamatan Pelaihari sehingga tata kelola kearsipan menjadi efektif dan tepat sasaran.
 - b. Melakukan usulan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf ASN Kecamatan Pelaihari dalam rangka penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD, Laporan Kinerja SKPD sehingga tahapan penyusunan perencanaan daerah, penyusunan anggaran daerah dan penatusahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan.
 - c. Melakukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk kendaraan operasional Tahun 2022 Kecamatan Pelaihari.
- Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai saki yaitu :
- Pendekatan dan pengawalan terhadap usulan yang diajukan melalui SKPD yang membidangi kepegawaian, perencanaan anggaran dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah serta Badan Anggaran DPRD.

4. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Seksi)

Kecamatan Pelaihari sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian/seksi-seksi yang ada pada lingkup Kecamatan Pelaihari. Ada 4 (empat) Program dan 7 (tujuh) kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis pertama Kecamatan Pelaihari. Adapun Target, realisasi dan capaian Kinerja kepala subbagian dan Kepala Seksi lingkup kecamatan Pelaihari sebagai berikut:

1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tabel 25. Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA. 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1. Memfasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 desa	15 desa	15 Desa	100 %
2. Memfasilitasi jumlah desa yang menyampaikan LPPD	Jumlah desa yang menyampaikan Laporan LPPD dan LKPD dengan baik	15 desa	15 desa	15 desa	100 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
dan LKPD tepat waktu					
3. Memonitoring penyusunan laporan kependudukan	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	15 desa	15 desa	15 desa	100 %
4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 kali	2 kali	2 kali	100 %

Realisasi capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pelaihari terhadap target mencapai 100 %. Terasiliasinya semua desa baik dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dan BPD melalui pembinaan terkait tugas pokok dan fungsi Kasi Pemerintahan serta penyampaian regulasi peraturan perundang-undangan terkait kegiatan Kasi Pemerintahan Desa bersama dinas/instansi yang berwenang.



Gambar 2. Pelaksanaan tes wawancara dan praktik pemilihan calon staf administrasi BPD dan Calon Perangkat Desa Panggung Baru

Sedangkan Pembinaan dan monitoring penyusunan laporan kependudukan juga terlaksana pada 15 (lima belas) desa dan 5 Kelurahan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap masyarakat se Kecamatan Pelaihari yang terdiri dari 15 Desa dan 5 Kelurahan terkait perubahan data kependudukan, pindah domisili dan pembuatan akte kependudukan. Hal ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data penduduk laki-laki dan data penduduk perempuan serta jumlah kelahiran penduduk serta jumlah kematian penduduk untuk data bantuan sosial, data pemilih pada pemilu sehingga mencakup data yang terbaru.

a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Tata Pemerintahan

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 1 (satu) orang Kasi Tapem (Pejabat Pengawas) kegiatan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan antar SKPD, Forkompimda Kabupaten dan Kecamatan, instansi vertikal lainnya yang mengikutsertakan Kecamatan Pelaihari dalam setiap event kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kasi Tapem yaitu merekapitulasi data jumlah penduduk, fasilitasi pemilihan kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), fasilitasi pemilihan umum

legislatif, Pemilihan Presiden, Pemeliharaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten, serta penyusunan LPPD Desa.

b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pemulihan ekonomi pada Tahun 2022 masih belum merata dikarenakan adanya masa pemulihan terhadap pandemi covid-19, hal ini berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah agar lebih efisien dan fokus terhadap program prioritas daerah. Akibat keterbatasan anggaran tersebut, berdasarkan hasil verifikasi dan perhitungan anggaran yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut, Seksi Tata Pemerintahan tidak mempunyai program prioritas sehingga tidak mempunyai anggaran untuk menunjang kegiatan pada tahun 2022. Namun walaupun tanpa adanya anggaran, seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pelaihari tetap mampu menjalankan kinerja yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan.

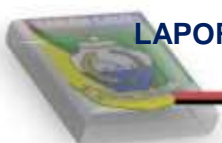
c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Tata Pemerintahan

1. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang hukum pertanahan bagi lurah/kepala desa, stakeholder terkait dalam hal permohonan akte tanah, pembuatan bea hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kecamatan Pelaihari.
2. Masih kurangnya aparatur desa dan operator desa melakukan updating data profil desa disistem aplikasi profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Tahun 2022 sehingga mendapat teguran dari Dinas PMD Kab. Tanah Laut karena akan dimonitoring dan evaluasi oleh Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.
3. Terlambatnya aparatur desa untuk melaporkan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) sesuai tepat waktu, karena laporan LPPD sebagai bentuk pertanggungjawaban mandat pemerintahan dan pembangunan yang diemban aparatur desa kepada masyarakat desa, kepada Kecamatan dan Dinas PMD Kab. Tanah Laut.

d. Solusi kendala/Permasalahan yang dihadapi Seksi Tata Pemerintahan

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai hukum pertanahan bagi lurah/kepala desa, stakeholder terkait dalam hal permohonan akte tanah, pembuatan bea hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kecamatan Pelaihari.



2. Melakukan pelatihan bagi aparatur desa dan operator desa pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi profil desa dan kelurahan (prodeskel) pada 15 Desa se Kec. Pelaihari dengan di dampingi oleh Dinas PMD Kab. Tanah Laut.
3. Memberikan surat pemberitahuan untuk menyampaikan laporan LPPD tepat waktu diterima sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

e. Rencana aksi yang akan dilakukan Seksi Tata Pemerintahan

1. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional dan pejabat Notaris untuk memberikan sosialisasi dan fasilitasi pengurusan pembuatan sertifikat tanah hak milik, hak guna usaha agar aparatur desa dan masyarakat lebih mudah mengurus dengan pelayanan cepat, mudah dan biaya murah.
2. Menyusun jadwal pelatihan bagi aparatur desa atau operator desa pertriwulan dengan pejabat yang membidangi atau petugas admin aplikasi profil desa dan kelurahan (prodeskel) pada Dinas PMD Kab. Tanah Laut.
3. Melakukan pendampingan dan monev secara berkala bagi desa yang belum menyampaikan LPPD Desa kepada kecamatan dan Dinas PMD.

2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa kecamatan Pelaihari terhadap target mencapai 100% kecuali realisasi capaian jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP hanya mencapai 44% dari target 50 Dokumen atau hanya terealisasi sebanyak 22 dokumen, realisasi fasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi terealisasi 5 kelompok (100 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 26 berikut.

Tabel 26. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	100%
2. Memberikan pembinaan tentang penyuluhan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	15 desa	15 desa	15 desa	100 %
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	15 desa	15 desa	15. desa	100 %
4. Memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersial	Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersil sesuai SOP	33 Dokumen	50 Dokumen	22 dokumen	44 %
5. Fasilitasi kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100 %

Pelaksanaan fasilitasi pemasaran hasil produksi dilaksanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-57 serta dengan mengangkat BUMDes yang ada di Kecamatan yang bergerak dalam usaha pembuatan telur asin, peternakan lebah madu, krupuk, sewa tenda, asinan buah tetap berjalan sampai dengan sekarang.

Salah satu kelompok dari Desa Bumi Jaya yaitu Kelompok “Rumus” dengan bidang usaha catering makanan, sewa tenda dan lain-lain sampai dengan sekarang.

Promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa dilaksanakan pada 15 (lima belas) desa. Kegiatan monografi kecamatan dan profil desa di bawah koordinasi Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan kegiatan penyusunan monografi kecamatan dan profil desa berjalan dengan baik.

Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022, yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APBDesa untuk 15 (lima belas) desa yang ada di Kecamatan Pelaihari dengan Persentase capaian kegiatan sebesar 100 % .



Gambar 3. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pelaihari

Pelaksanaan Musrenbang desa dilakukan oleh 15 desa yang ada dilingkup kecamatan Pelaihari dan dilanjutkan dengan Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan menghadirkan utusan desa, Pendamping Desa dan kecamatan serta instansi terkait.



Gambar 4. Pelaksanaan Musrenbang Desa di Kecamatan Pelaihari

Kegiatan selanjutnya pada Seksi PMD/K pada Kecamatan Pelaihari juga melaksanakan Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan pada 15 Desa se Kecamatan Pelaihari yang difasilitasi oleh Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan Kecamatan Pelaihari, hal ini sebagai perwujudan pengawasan penatausahaan keuangan desa baik Dana Desa dari Dana Kemendesa dan PDT maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 5. Pelaksanaan Evaluasi APBDes di Kecamatan Pelaihari

a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi PMD/K

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi PMD/K di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi PMD/K (Pejabat Pengawas) dan 1 orang staf ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi PMD/K yaitu melakukan kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), Pelaksanaan Evaluasi APBDes, Evaluasi APBDes perubahan, melakukan fasilitasi kelompok masyarakat dalam memasarkan produknya.

b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Dalam menjalankan kegiatannya, seksi PMD/K ditunjang dengan 2 (dua) program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 22.888.921,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

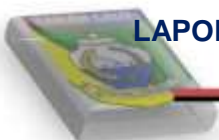
Tabel 27. Sumber Daya Anggaran pada Seksi PMD/K Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase Capaian Anggaran 2022
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.975.377,00	12.043.866,00	92,82%
a.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.975.377,00	12.043.866,00	92,82%
-	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12.975.377,00	12.043.866,00	92,82%
2.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.913.544,00	0	0%
a.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.913.544,00	0	0%
-	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.913.544,00	0	0%
JUMLAH		22.888.921,00	12.043.866,00	52,61%

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan dari anggaran Rp. 12.975.377,- dapat terealisasi Rp. 12.043.866,- dengan persentase capaian 92,82%. Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa tidak ada realisasi keuangan atau capaian realisasi keuangannya 0% dikarenakan saat pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan, Kecamatan Pelaihari ikut anggaran di Kecamatan Bajuin.

c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi PMD/K

1. Terbatasnya usulan perencanaan pembangunan pada hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang diusulkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten.
2. Kurangnya koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan untuk keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



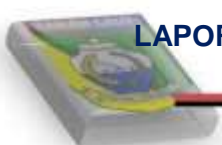
3. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan bagi aparatur desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Dana Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten, maupun Dana Desa dari Kementrian Desa dan PDT yang berasal dari Dana APBN.

d. Solusi atas Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi PMD/K

1. Melakukan skala prioritas untuk usulan perencanaan pembangunan serta pendekatan kepada anggota legislatif sesuai daerah pemilihan (dapil) untuk dimasukkan pada usulan pokok pikiran (pokir) DPRD.
2. Melakukan indentifikasi program dan kegiatan desa yang di susun oleh aparatur desa akan di selaraskan dengan Rencana Kerja SKPD, RPJMD dan visi misi Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah sehingga percepatan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dapat direalisasikan bagi masyarakat desa.
3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa bagi aparatur desa dalam penataan administrasi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang di dukung dengan aplikasi sistem manajemen keuangan desa sehingga tidak terjadi penyimpangan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa.

e. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Seksi PMD/K yaitu :

1. Meningkatkan perbaikan kualitas rancangan kerja awal usulan perencanaan pembangunan yang terdiri dari usulan aspirasi masyarakat, pokok pikiran DPRD (Pokir DPRD) dimulai Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang Kecamatan.
2. Mengikutsertakan perwakilan masyarakat dari tiap RT/RW dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat juga dapat turut memahami, mengerti, mengawal, dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk penyusunan standar satuan harga (SSH) dan Pelaporan Aset Desa sebagai lampiran penyusunan Laporan Keuangan Desa.



3) Kepala Seksi Kemasyarakatan

Tabel 28. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan TA. 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1. Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat di Bidang Kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina dibidang kemasyarakatan	10 Kelompok	15 kelompok	15 Kelompok	100 %
2. Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP	14 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100 %
3. Memfasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan social	1785 orang	1000 orang	854 orang	85,4 %

Kegiatan pembinaan kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan di Kecamatan Pelaihari yaitu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kecamatan Pelaihari. Fasilitasi dan pembinaan terutama dalam dalam rangka mempersiapkan kontingen Kecamatan Pelaihari untuk lomba MTQ tingkat Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada Tahun 2022 di Kecamatan Bati-Bati.

Fasilitasi kegiatan dibidang sosial keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan yang di targetkan 3 kegiatan terealisasi 3 kegiatan (100 %) yaitu kegiatan Pengiriman Kafilah Kec. Pelaihari mengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tahun 2022 Tingkat Kabupaten di Kecamatan Bati-bati. Pada Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 di Kecamatan , kafilah Kecamatan Pelaihari mendapatkan juara 1 dari 11 Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 6. Kafilah MTQKecamatan Pelaihari pada MTQ Tingkat KabupatenTanah Laut Tahun 2022 di Kecamatan Bati-bati

Kegiatan lainya yang dilaksanakan kasi kemasyarakatan yakni Safari Ramadhan dan buka Puasa Bersama Bupati dan Waki Bupati Tanah Laut bersama masyarakat pada bulan ramadhan.



Gambar 7. Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan Masyarakat Desa Pemuda pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2022

Selain itu kegiatan yang dilaksanakan Kasi Kemasyarakatan yaitu Sosialisasi Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab. Tanah Laut yaitu Program Visi dan Misi Kepala Daerah Pemberian Hibah 1 miliar untuk Kecamatan dengan organisasi kemasyarakatan yang menerima hibah sebanyak 6 organisasi dengan jumlah organisasi yang merealisasikan sebanyak 4 organisasi sedangkan 2 organisasi tidak melaksanakan karena ada permasalahan baik masalah administrasi maupun kendala di internal organisasi.

a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Kemasyarakatan

Dalam menjalankan kegiatan, Seksi Kemasyarakatan di Kecamatan Pelaihari dibantu dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Kemasyarakatan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN (jabatan pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Kemasyarakatan yaitu melakukan kegiatan fasilitasi kafilah Kec. Pelaihari mengikuti kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 di Kec. Bati-bati, kegiatan Buka Puasa bersama Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut beserta masyarakat pada bulan ramadhan Tahun 1443 h, Sosialisasi Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

b. Analisa Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Dalam menjalankan kegiatannya, seksi Kemasyarakatan ditunjang dengan 1 (satu) program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 703.402.821,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Capaian realisasi anggaran seksi kemasyarakatan mencapai 81,88% atau dari anggaran Rp. 703.402.821,-

teralisasi sebesar Rp. 575.937.933,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 29. Sumber Daya Anggaran pada Seksi Kemasyarakatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase Capaian Anggaran 2022
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	703.402.821,00	575.937.933,00	81,88%
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	703.402.821,00	575.937.933,00	81,88%
-	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	703.402.821,00	575.937.933,00	81,885
JUMLAH		703.402.821,00	575.937.933,00	81,88%

c. Permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran hibah

Belum tertibnya organisasi kemasyarakatan dalam melakukan penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan dana hibah karena kuitansi yang dibelanjakan tidak mengikuti RAB pencairan dan lampiran pendukung SPJ-nya.

d. Solusi Yang Dilakukan Dalam Penyaluran Hibah

Melakukan Sosialisasi Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Hibah kepada organisasi penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Rencana Aksi Yang Akan Dilakukan

Menyusun draft tahapan penyampaian dan verifikasi proposal, serta menyesuaikan satuan standar harga yang dibuat Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut sehingga rencana anggaran biaya (RAB) memakai Standar Harga Pemerintah Daerah dengan bimbingan Seksi Kesmas Kecamatan Pelaihari.

4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tabel 30. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban TA. 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1. Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di fasilitasi	2 kejadian	2 Kejadian	2 Kejadian	100 %
2. Membina kelompok masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif	10 kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100 %
3. Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	2 kejadian	2 Kejadian	2 Kejadian	100 %
4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang I monitoring	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %

Pembinaan kelompok masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban yang aktif melalui kelompok perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada di 15 (lima belas) desa dan 5 (lima) Kelurahan yang ada di kecamatan Pelaihari.

Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Pelaihari yang di monitoring selama tahun 2022 terealisasi 2 (dua) penanganan yaitu;

1. Patroli bersama dengan Satpol PP, Polsek dan Danramil kecamatan Pelaihari tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 ke tempat kerumunan masyarakat desa seperti warung, poskamling dan pasar. Menegur dan membubarkan kerumunan serta mensosialisasikan prokes COVID 19 dan membagikan Masker kepada warga yang kepadatan tidak menggunakan masker.



Gambar 8. Operasi Gabungan Penerapan Protokol Kesehatan dan Penertiban Jam Malam di Kelurahan Sarang Halang

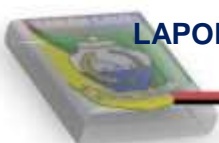
2. Patroli bersama Tim Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Badan Kesbangpol dan DP2KB dan P3A melakukan sidak dan pengecekan ke warung-warung di Kelurahan Sarang Halang yang menggunakan anak di bawah umur untuk bekerja, setelah diberikan pengertian anak tersebut di kembalikan kepada orang tuanya.



Gambar 9. Kegiatan Monitoring IMB Pagar dan Bangunan

a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertibandi Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Trantib (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf



ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban yaitu melakukan kegiatanfasilitasi penanganan gangguan dan keamanan, membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban, sosialisasi dan monitoring penanganan gangguan ketentaman dan ketertiban .

b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

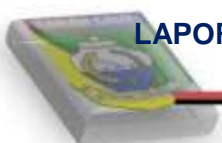
Pemulihan ekonomi pada Tahun 2022 masih belum merata dikarenakan adanya masa pemulihan terhadap pandemi covid-19, hal ini berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah agar lebih efisien dan fokus terhadap program prioritas daerah. Akibat keterbatasan anggaran tersebut, berdasarkan hasil verifikasi dan perhitungan anggaran yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban tidak mempunyai program prioritas sehingga tidak mempunyai anggaran untuk menunjang kegiatan pada tahun 2022. Namun walaupun tanpa adanya anggaran, seksi ketentraman dan ketertiban Kecamatan Pelaihari tetap mampu melaksanakan tujuan kinerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2022.

c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Kurangnya personel/SDM dalam melakukan patroli melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda)Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sengketa dibidang pertanahan diwilayah Kecamatan Pelaihari serta penertiban warung-warung yang berjualan memperkerjakan anak-anak dibawah umur.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan protokol kesehatan (Prokes) dalam melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, kegiatan sosial di tempat kerja, pasar, dan fasilitas publik yang menjadi kerumunan atau perkumpulan orang banyak.

d. Solusi atas Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Melakukan usulan penambahan personel/SDM pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam kegiatan penegakan Perda Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sengketa dibidang pertanahan di



wilayah Kecamatan pelaihari serta memberikan sosialisasi kepada pemilik warung untuk tidak memperkerjakan anak dibawah umur.

- Melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat dengan meminta bantuan dan dukungan dari para tokoh alim ulama, para pengurus masjid, musholla, majelis ta'lim untuk agama islam, para pastor untuk gereja, para pendeta untuk pura, dan para biksu untuk vihara beserta forkompimcam Kec. Pelaihari menjaga protokol kesehatan selama menjalankan kegiatan ibadah masing-masing dengan melakukan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker) sesuai arahan Tim Gugus Tugas COVID 19 Kabupaten Tanah Laut.

e. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- Melakukan *mapping* (pemetaan) dan sistem operasional prosedur atas perijinan pembangunan rumah dan toko bekerja sama dengan SKPD terkait (DPMPTSP Tala, Bapenda Tala, Kantor ATR Tala, DPRKPLH Tala) bagi masyarakat sehingga bentuk monitoring dan evaluasi atas pelayanan pembuatan IMB dapat dievaluasi secara berkala.
- Melakukan sinergi dan koordinasi kepada seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pastor, pendeta, dalam mensosialisasikan protokol kesehatan dalam kegiatan aktivitas ibadah dan aktivitas sosial sebagai kewaspadaan bersama dalam menurunkan angka penularan COVID 19 di Kecamatan Pelaihari.

5) Kepala Seksi Pelayanan

Tabel 31. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan TA. 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 pelayanan	15 pelayanan	15 pelayanan	100 %
2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	5 pengaduan	5 Pengaduan	0 Pengaduan	0 %
3. Menyusun Data Informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2 dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pelaihari, salah satu kegiatan yang dilaksanakandalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Pelaihari pada Tahun 2022 memperoleh IKM sebesar 3,480 (87,01) dengan mutu pelayanan berkategori sangat baik.

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2022 sebanyak 15 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi penuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha

B. Pelayanan Perizinan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial
2. Izin Usaha Mikro dan Kecil
4. Izin Bilyard Non Komersial
5. Izin Playstation/Video Game

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Pelaihari. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 15 jenis pelayanan non perizinan dan 4 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2022 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pelaihari. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 29 berikut:

Tabel 32. Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan Rekomendasi Perizinan	-	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan Rekomendasi Nikah	138	Seksi Kemasyarakatan
3	Pelayanan Pindah Domisili	23	Seksi Tapem
4	Pelayanan Pengantar KTP	-	Seksi Tapem
5	Pelayanan Pengantar Kartu Keluarga	-	Seksi Tapem
6	Pelayanan Legalisasi Permohonan Perizinan	-	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	395	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	312	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Surat Keterangan Ghoib	-	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Proposal Bantuan	-	Seksi Kemasyarakatan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
11	Pelayanan Surat Keterangan Berkelakuan Baik	20	Seksi Pelayanan
12	Pelayanan Surat Izin Keramaian	-	Seksi Trantib
13	Pelayanan Surat Kehilangan	8	Seksi Pelayanan
14	Pelayanan Surat Keterangan Usaha	9	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial	49	Seksi PMD
16	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	9	Seksi Pelayanan
17	Pelayanann Izin Bilyard Non Komersial	-	Seksi Pelayanan
18	Pelayanan Izin Playstation/Video Game	-	Seksi Pelayanan

Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang disusun dalam bentuk laporan kegiatan seksi Pelayanan. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,01 dari 150 responden yang mengisi kuisioner.

a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Pelayanan

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi pelayanan di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi pelayanan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dan 2 (dua) orang staf PTT dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan yaitu melakukan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.



Gambar 10. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik terkait Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan Pelaihari

b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pemulihan ekonomi pada Tahun 2022 masih belum merata dikarenakan adanya masa pemulihan terhadap pandemi covid-19, hal ini berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah agar lebih efisien dan fokus terhadap program prioritas daerah. Akibat keterbatasan anggaran tersebut, berdasarkan hasil verifikasi dan perhitungan anggaran yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut, Seksi

Pelayanan tidak mempunyai program prioritas sehingga tidak mempunyai anggaran untuk menunjang kegiatan pada tahun 2022. Namun walaupun tanpa adanya anggaran, seksi pelayanan Kecamatan Pelaihari tetap mampu melaksanakan tujuan kinerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2022.

c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Pelayanan

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah belum adanya aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Pelaihari yang terhubung dengan Kelurahan dan Pemerintah Desa.

d. Solusi Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu Mencoba mengembangkan aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Pelaihari.

Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai Sakip yaitu :

- ❖ Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mendorong pengembangan aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan.
- ❖ Melakukan pembuatan media sosial untuk mendukung informasi akan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan sebagai sarana informasi publik terhadap kinerja Kecamatan.

e. Rencana Aksi yang dilaksanakan pada Seksi Pelayanan

Melakukan komitmen pelayanan sesuai Zona Integritas (ZI) yang kuat pada personel/SDM Kecamatan Pelaihari agar pelayanan terpadu kecamatan kepada masyarakat lingkup Kecamatan Pelaihari.

6) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 33. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian TA. 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	17 orang	17 orang	18 orang	105,8 %
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	223 unit	223 Unit	223 unit	100 %
3. Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100 %

Jumlah pegawai dilingkup Kantor Kecamatan Pelaihari sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yaitu 18 (delapan belas) orang ASN dan 8 (delapan) orang

PTT. Semua kebutuhan administrasi perkantoran terlayani dengan baik. Realisasi Target indikator kinerja mencapai 105,8%.

Jumlah sarana prasarana yang terpelihara dengan baik dan memadai sebagai sarana dan penunjang kegiatan sebanyak 223 unit yang terdaftar dalam inventarisasi barang dalam kondisi baik.

Jumlah dokumen administrasi kepegawaian sampai dengan per 31 Desember 2022 sebanyak 18 (delapan belas) ASN. Administrasi kepegawaian saat ini sudah menggunakan aplikasi SIMPeg yang memudahkan proses pencatatan dan pengolahan data dan informasi kepegawaian yang diminta. Realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2022 sudah dilaksanakan penilaian oleh pimpinan sesuai tingkatannya dan ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari tidak ada yang memiliki nilai rata-rata kurang atau sangat kurang.

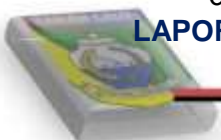
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2022 antara lain melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional lainnya serta pembayaran honorarium pegawai tidak tetap.

a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 4 (empat) orang yaitu 1 orang Kasubbag Umpeg (Pejabat Pengawas) dengan dibantu (3 orang) orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dan 5 (lima) orang staf PTT dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana kantor, serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian.

b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam menjalankan kegiatan selama tahun anggaran 2022, sub bagian umum dan kepegawaian ditunjang oleh 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 434.303.597,- (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2022 capaian realisasi keuangan sub bagian umum dan kepegawaian mencapai 93,66% atau dengan anggaran Rp. 434.303.597,- terealisasi sebesar Rp. 406.778.720,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 34. Realisasi Anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase Capaian Anggaran 2022
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	434.303.597,00	406.778.720,00	93,66%
a.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.844.930,00	112.113.204,00	91,26%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.545.473,00	6.773.000,00	89,76%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.122.473,00	28.337.500,00	80,68%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.176.984,00	7.058.200,00	69,35%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	69.944.504,00	99,92%
b.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.674.467,00	227.372.807,00	94,87
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.757.080,00	30.426.439,00	72,87
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.917.387,00	196.946.368,00	99,51
c.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.784.200,00	67.292.709,00	93,74
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	58.749.109,00	97,92
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.784.200,00	8.543.600,00	72,50
	JUMLAH	434.303.597,00	406.778.720,00	93,66%

c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

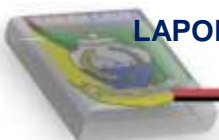
1. Kurangnya petugas staf/ASN pengelola kearsipan dalam mengerjakan tugas mengelola arsip di Kecamatan Pelaihari.
2. Belum adanya dengan perintah diwajibkan sistem aplikasi Sosialita pada pengadaan barang dan jasa belum maksimal dilakukan terkendala belum lengkapnya permintaan untuk pembelian barang dan jasa.

d. Solusi permasalahan yang akan dilaksanakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Melakukan usulan penambahan personel staf/ASN pengelola kearsipan yang mempunyai keahlian menyusun arsip, menata arsip, didukung sarana dan prasarana ruang arsip yang memadai.
2. Melakukan sosialisasi dan promosi atas manfaat aplikasi sosialita bagi penyedia barang dan jasa untuk berkontribusi dan mengikutsertakan para pengusaha UMKM dalam pembangunan daerah.

e. Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Memberdayakan pegawai PTT yang ada membantu dalam mengelola kearsipan yang ada di Kecamatan Pelaihari.



2. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi yang bergerak dibidang penyedia barang dan jasa (KADIN, GAPENSI, HIPMI dll) agar bergabung dalam aplikasi Sosialita sebagai aplikasi katalog lokal yang dibuat Bagian Pelayanan Barang dan Jasa Setda Kab. Tanah Laut untuk memudahkan staf ASN Kec. Pelaihari menggunakan aplikasi Sosialita dan menggunakan dalam penatausahaan keuangan daerah.

7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 35. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Perencanaan dan Keuangan TA. 2022

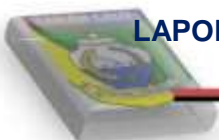
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7 dokumen	7 Dokumen	100 %
2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100 %

Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Dokumen Renstra 2019-2023, Dokumen Renja 2023, Dokumen Renja Perubahan Tahun 2022, Dokumen RKA Tahun 2023 dan RKA Perubahan Tahun 2022, Dokumen DPA dan DPA-Perubahan 2022. Dengan demikian realisasi capaian target sesuai target (100%).

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Laporan Kinerja Pemerintahan 2022, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2022 dan Laporan Keuangan semesteran dan prognosis 2022. Dengan demikian realisasi capaian target mencapai 100%

a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Perencanaan dan Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 2 orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dan 1 (satu) orang staf PTT dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan kegiatan perencanaan kinerja dan keuangan, laporan keuangan dan laporan kinerja.



b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan selama tahun anggaran 2022, sub bagian perencanaan dan keuangan ditunjang oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 10.129.932.257,- (sepuluh miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2022 capaian realisasi keuangan sub bagian perencanaan dan keuangan mencapai 86,99% atau dengan anggaran Rp. 10.129.932.257,- terealisasi sebesar Rp. 8.812.466.425,00,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 36. Realisasi Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase Capaian Anggaran 2022
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.129.932.257,00	8.812.466.425,00	86,99%
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.129.932.257,00	8.812.466.425,00	86,99%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.129.932.257,00	8.812.466.425,00	86,99%

c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Kurangnya personel staf/ASN yang menangani kegiatan laporan perencanaan SKPD (Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).
2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf subbag perencanaan dan keuangan dalam update peraturan perundangan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah untuk menyusun laporan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan manual maupun aplikasi yang telah disediakan oleh kemandagri RI dan Kemenkeu RI.

d. Solusi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Melakukan penambahan personel staf/ASN subbag Perencanaan dan Keuangan yang menangani kegiatan laporan perencanaan SKPD (Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK)

Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).

2. Melakukan usulan anggaran kepada SKPD terkait mengenai pendidikan dan pelatihan bagi staf/ASN Subbag Perencanaan dan Keuangan mengikuti Bimtek, Diklat bidang perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah.

e. Rencana aksi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Melakukan transfer *knowledge* kepada staf/ASN subbag perencanaan dan keuangan dalam rangka pemerataan pembagian tugas dan pekerjaan agar penyelesaian kerja menjadi tepat waktu sesuai aturan perundang-undangan.
2. Melakukan pemanfaatan staf/ASN perencanaan dengan menggunakan hardware, software untuk penyusunan perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan pertanggungjawaban, pelaporan keuangan daerah sebagai SKPD yang mempunyai kewajiban melaporkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi terhadap target tahun 2022 untuk eselon IV mencapai 91,05%. Untuk lebih jelasnya Realisasi Target Indikator Kinerja eselon IV tahun 2021-2022 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 37.

Tabel 37. Realisasi Target Indikator Kinerja Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100
2.	Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Penjaringan aparat desa dan BPD	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100
3.	Jumlah Desa yang data Kependudukannya terverifikasi dengan akurat	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100
4.	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	2 kali	2 kali	2 kali	100
5.	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	0 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	100
6.	Jumlah desa yang menyusun profil desa dengan baik	15 desa	15 desa	15 desa	100
7.	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	15 desa	15 desa	15 desa	100
8.	Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	50 dokumen	50 dokumen	22 dokumen	44
9.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100
10.	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang di bina di bidang	10 Kelompok	15 kelompok	15 Kelompok	100

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	kemasyarakatan				
11.	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga sesuai SOP	14 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	100
12.	Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan social	1785 orang	1000 orang	854 orang	85,4
13.	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	2 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	100
14.	Jumlah kelompok masyarakat di bidang Ketentraman dan ketertiban yang aktif	5 Kelompok	5 kelompok	5 Kelompok	100
15.	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	2 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	100
15.	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
16.	Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PATEN) sesuai SOP	10 pelayanan	15 pelayanan	15 pelayanan	100
17.	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	1 Pengaduan	5 pengaduan	0 Pengaduan	0
18.	Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100
19.	Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	18 orang	17 orang	18 orang	105,8
20.	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	223 unit	223 unit	223 unit	100
21.	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100
22.	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 Dokumen	7 dokumen	7 Dokumen	100
23.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 Dokumen	7 dokumen	7 Dokumen	100
Rata-Rata Capaian					93,13

1) Perbandingan realisasi dengan target

Dari hasil realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 ada beberapa capaian yang menurun yaitu Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP (44%), Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan social (85,4%) dan Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi (0 %) Penurunan capaian pada kegiatan tersebut dikarenakan Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya (100 %), dan Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP (100%).

Sebaliknya realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2022 melampaui target seperti Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik (105,8 %).

Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat di Kecamatan Pelaihari tahun 2022 sebanyak 0 kejadian dari target 5 kejadian. Hal ini dikarenakan masyarakat

sudah merasa puas dalam mendapatkan pelayanan karena tidak dikenakan tarif biaya (gratis). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro sebagai antisipasi penyebaran COVID 19 oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Pencegahan dan Penanganan COVID 19 Kab. Tanah Laut, sehingga pelaksanaan kegiatan di pasar, aktivitas kegiatan keagamaan dan aktivitas lainnya diatur sesuai dengan protokol kesehatan.

Dengan terbukanya informasi publik berimplikasi pada transparansi pemerintah dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan, maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui layanan pengaduan.

2) Perbandingan realisasi dengan Realisasi Terkait

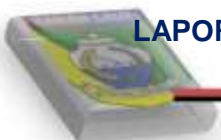
Realisasi kinerja berdasarkan rata-rata capaian tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 untuk kinerja eselon IV mengalami kenaikan dari 91,07% menjadi 93,13%.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP dari target 3 kegiatan terlaksana 3 kegiatan (100 %) yaitu pelaksanaan Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 di Kecamatan Bati-Bati, kegiatan buka puasa bersama/safari ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut beserta unsur forkompimda serta kepala SKPD dengan masyarakat Kecamatan Pelaihari, pelaksanaan Hibah 1 Milyar bagi organisasi masyarakat dalam bidang keagamaan, kepemudaan, seni dan budaya.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dari 4 (empat) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 12 (dua belas) sub kegiatan yang diamanatkan kepada Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 yaitu Pagu APBD Murni Awal sebesar Rp. 11.750.376.143,- setelah APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 11.089.723.901,- terjadi kenaikan anggaran sebesar 1,81%. Sedangkan Realisasi belanja sebesar Rp. 9.807.226.944,- dengan capaian sebesar 86,86 % dari pagu Perubahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Pelaihari dan Kelurahan yang ada pada lampiran di bawah.



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Pelaihari pada tahun 2022 menganggarkan jumlah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 19.233.250,- dan Anggaran Belanja sebesar Rp. 11.089.723.901,- .

Setelah pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan anggaran belanja sebesar Rp. 11.290.527.596,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 9.807.226.944,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 86,86% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.483.300.652,- (13,13%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 38 sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	PAGU MURNI 2022	PAGU PERUBAHAN 2022	REALISASI (Rp).	(%)
1.	PENDAPATAN				
	a. PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	- Retribusi Daerah	19.233.250,-	19.233.250,-	0,-	0
2	BELANJA	11.089.723.901,-	11.290.527.596,-	9.407.265.490,-	83
	a. BELANJA OPERASI	11.089.723.901,-	10.559.704.001,-	9.393.075.490,-	79,31
	b. BELANJA MODAL	0,-	4.531.853,-	14.190.000,-	87,37

2. Anggaran dan Realisasi APBD 2022 Berdasarkan Program dan Kegiatan

Tabel 39. Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kantor Kecamatan Pelaihari

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Program	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	Persentase (%)
1.	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.129.932.257,-	8.812.466.425,-	86,99
2.	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	434.303.597,-	406.778.720,-	93,66
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	12.975.377,-	12.043.866,-	92,82
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	703.402.821,-	575.937.933,-	81,88
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.913.544,-	0	0
JUMLAH			11.290.527.596	9.807.226.944,-	86,86

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 93,13% maka realisasi keuangan sebesar 86,86% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Realisasi Persentase Keuangan, Kinerja dan Efisiensi Sasaran Strategis Kecamatan Pelaihari Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	% Keuangan	% Kinerja	% Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	87,26	104,76	17,3
2.	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD			
3.	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja			
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	58,23	83,33	25,10

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

Pada tahun 2021 ada 6 Program dan 10 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan, dibandingkan tahun 2022 jumlah program 4 dan 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan. Adapun untuk anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 11.290.527.596,- yang sedikit menurun dibandingkan anggaran tahun 2021 yaitu sebesar Rp.11.603.760.073,-. Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah Program dan Kegiatan dan pagu 2021 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Perbandingan Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2021-2022

TAHUN 2021			TAHUN 2022		
Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
6	10	27	4	7	12
Total Anggaran			Total Anggaran		
Rp. 11.603.760.073,-			Rp. 11.290.527.596,-		

Adapun realisasi Belanja pada tahun 2022 sebesar Rp.9.407.265.490,- dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 9.219.014.187,-. mengalami kenaikan realisasi dibanding tahun 2021. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan tidak dapat direalisasikan karena Kecamatan sudah tidak diperkenankan memungut IMB Non Komersil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)	
		2022	2021
1.	PENDAPATAN	Rp. 0,-	Rp. 18.832.500,-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 0,-	Rp. 18.832.500,-
	Retribusi Daerah	Rp. 0,-	Rp. 18.832.500,-
2.	BELANJA	Rp. 9.407.265.490,-	Rp. 9.219.014.187,-
	BELANJA OPERASI	Rp. 9.393.075.490,-	Rp. 9.047.220.927,-
	Belanja Pegawai	Rp. 7.788.182.216,-	Rp. 7.413.260.715,-
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.177.513.274,-	Rp. 700.561.612,-
	Belanja Hibah	Rp. 427.380.000,-	Rp. 933.398.600,-
	BELANJA MODAL	Rp. 14.190.000,-	Rp. 171.793.260,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 14.190.000,-	Rp. 122.236.442,-
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp. 0,-	Rp. 49.556.818,-

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

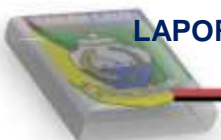
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban keempat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja sangat memuaskan. Indikator kinerja program yang terdiri dari 3 sasaran dan 23 Indikator kinerja** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 86,86. % dengan rincian 18 (delapan belas) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**, 1 indikator dengan tingkat kinerja **Baik**, 3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian kinerja **Cukup**, dan 1 dengan nilai **kurang**.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Adapun strategi peningkatan kinerja dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup SKPD Kecamatan Pelaihari
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Pelaihari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana.
4. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
5. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascadedown*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.
6. Meningkatkan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas yaitu dengan meminta tambahan pegawai baru dan mengikutsertakan dalam Diklat/Bimtek bagi pegawai lama.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik dan terus menjaga dan meningkatkan peran aktif dari semua aparatur kecamatan serta komitmen untuk membangun kecamatan khususnya dan daerah pada umumnya



8. Demikian laporan kinerja Kecamatan Pelaihari ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pelaihari, Januari 2023
Camat Pelaihari,



AGUS SETIYO, SSTP, M.M
Pembina / (IV/a)
NIP. 19850808 200412 1 001